

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2003). Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak. Hal ini menyebabkan sektor perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang selalu diandalkan pemerintah daerah. Akibat pentingnya peranan pajak tersebut, mengakibatkan pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaannya.

Pemerintah provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berusaha untuk selalu mengoptimalkan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu komponen penting pendapatan daerah dalam PAD yang harus dikembangkan karena kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar yaitu sebesar 41%. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Provinsi Lampung adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan merupakan sumber penerimaan utama bagi pajak daerah Provinsi Lampung. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kontribusinya yang besar terhadap pajak daerah. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari lima jenis pajak yang termasuk dalam pajak Provinsi Lampung yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Air Bawah Tanah (PABT). Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai pendapatan terbesar yaitu masing – masing realisasinya pada tahun 2013 sebesar Rp. 492.623.956.711 dan Rp. 688. 235. 709.764. Sedangkan untuk pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 364. 399.037. 460, Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 2.047.473.300 (Dispenda Lampung, 2014).

Besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadikan pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan kedua pajak tersebut. Potensi tersebut dapat diketahui dengan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2009 sebanyak 1.683.085.085 unit, di tahun 2010 sebanyak 1.779.290 unit sedangkan pada tahun 2011 menjadi 2.078.922 unit (BPS, 2012). Oleh sebab itu, dengan besarnya potensi pada kendaraan bermotor tersebut maka pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan peluang itu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah. Dalam perda tersebut, terdapat kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu adanya kebijakan tarif pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tarif merupakan salah satu kebijakan dalam perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 973/0037/111.18/01/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap pajak daerah Provinsi Lampung. Untuk mengetahui perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, maka dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung.

Tahun	PKB (Rupiah)	
	Target	Realisasi
2009	247.100.000.000	251.696.070.311
2010	260.100.000.000	297.395.426.967
2011	328.507.000.000	360.173.551.621
2012	425.507.000.000	445.059.044.873
2013	516.000.000.000	492.623.956.711
2014	560.000.000.000	544.701.492.841

*Sumber : Dispenda Lampung, 2015*

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa PKB pada tahun 2009 - 2011 yaitu sebelum adanya kebijakan tarif mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya baik target maupun realisasi penerimaannya. Realisasi penerimaannya selalu dapat melebihi dari target yang telah ditentukan. Tahun 2009 realisasi PKB sebesar Rp. 251.696.070.311, realisasi penerimaan tersebut lebih besar dari target yang telah ditentukan yaitu Rp. 247.100.000.000. Hal itu terjadi sampai tahun 2011. Pada tahun 2012, meskipun kebijakan tarif sudah mulai diberlakukan, realisasi penerimaannya masih mencapai target yaitu Rp. 445.059.044.873. Akan

tetapi, tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan PKB tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Perda yang dikeluarkan pemerintah Lampung pada tahun 2011, maka pada Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah kendaraan yang dimiliki (Mardiasmo, 2011). Pajak tersebut dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan. Apabila pemilik kendaraan bermotor mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor berdasarkan atas pengenaan di atas, maka akan dikenakan tarif progresif. Tarif yang dikenakan adalah pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, sedangkan untuk kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (Perda, 2011). Pengenaan tarif pajak progresif ini dilakukan karena sekarang ini banyak sekali masyarakat yang dalam satu keluarga memiliki kendaraan bermotor yang berjumlah lebih dari satu unit. Oleh sebab itu, dengan pengenaan tarif progresif ini diharapkan mampu meningkatkan pajak daerah, karena dengan meningkatnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Selain itu juga pengenaan tarif progresif ini memiliki asas keadilan karena orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu akan dikenakan pajak yang semakin tinggi dan sebaliknya.

Selain adanya kebijakan tarif progresif, dalam Perda No. 2 Tahun 2011 juga terdapat kebijakan mengenai tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan ke dalam badan usaha. Pajak ini juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap pajak daerah Provinsi Lampung. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung

Tahun	BBNKB (Rupiah)	
	Target	Realisasi
2009	228.000.000.000	253.019.253.562
2010	330.500.000.000	411.022.579.707
2011	532.460.000.000	550.806.624.927
2012	757.000.000.000	698.644.387.397
2013	813.907.700.000	688.235.709.764
2014	716.809.000.000	712.469.025.097

Sumber : *Dispenda Lampung, 2015*

Pada Tabel 2 target dan realisasi penerimaan BBNKB sebelum adanya kebijakan tarif selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2009 target BBNKB sebesar Rp.228.000.000.000 dan realisasinya penerimaannya Rp. 253.019.253.562. Realisasi penerimaan BBNKB lebih besar dari target yang telah ditentukan terjadi hingga tahun 2011. Tahun 2012 setelah kebijakan tarif mulai diberlakukan, realisasi penerimaan BBNKB tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat realisasi BBNKB tahun 2012 hanya sebesar Rp. 698.644.387.397 sedangkan target yang ingin dicapai adalah Rp.698.644.387.397. Begitu juga dengan tahun selanjutnya yaitu 2013 dan 2014. Bahkan tahun 2013 realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 realisasinya

Rp.698.644.387.397 sedangkan tahun 2013 menjadi Rp.688.235.709.764. Namun, tahun 2014 realisasinya mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target.

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, terdapat kebijakan baru pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dengan kenaikan tarif pajak. Sebelumnya sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tarif pajak BBNKB adalah hanya sebesar 10%.

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, tarif BBNKB di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sepeda motor sebesar 15%
- b. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 atau mobil umum sebesar 12.5%
- c. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 atau mobil untuk umum sebesar 7,5 %
- d. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Adanya kebijakan tarif pada PKB dan BBNKB adalah salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2013 adalah Rp. 1.547.325.146 dari total PAD yaitu

Rp.1.765.816.180. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai kontribusi yang besar terhadap PAD.

Besarnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung yang menjadi potensi penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Lampung juga bisa disebabkan karena adanya indikator makro. Salah satu indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak, karena dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan yang terjadi bersumber dari rakyat (Nadya, 2013). Secara makro jika pertumbuhan ekonomi naik maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, maka dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</b>
2009	5.3
2010	5.88
2011	6.43
2012	6.53
2013	5.97

*Sumber : BPS Lampung, 2014*

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 mengalami trend yang positif setiap tahunnya meskipun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah 5,3 persen kemudian pada tahun 2013 menjadi sebesar 5,97 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang

ada di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun turun pada tahun terakhir.

Jika dilihat dari potensi daerahnya, PKB dan BBNKB merupakan sumber penerimaan paling ideal sebagai sumber pendapatan terbesar diantara sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun, selain itu potensi PKB dan BBNKB juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, usaha pemerintah untuk mengoptimalkan PKB dan BBNKB melalui kebijakan tarif juga diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan penerimaan dari kedua pajak tersebut. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerimaan pajak tersebut dengan mengambil judul ” Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tarif Di Provinsi Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan tarif di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan tarif di Provinsi Lampung?
3. Apakah jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan tarif berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Provinsi Lampung?



4. Apakah jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan tarif berpengaruh terhadap penerimaan BBNKB di Provinsi Lampung?
5. Apakah jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Provinsi Lampung?
6. Apakah jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan BBNKB di Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan tarif di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan tarif di Provinsi Lampung.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan tarif terhadap penerimaan PKB di Provinsi Lampung.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan tarif terhadap penerimaan BBNKB di Provinsi Lampung.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama terhadap penerimaan PKB di Provinsi Lampung.

6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama terhadap penerimaan BBNKB di Provinsi Lampung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
2. Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan dan melakukan penelitian selanjutnya tentang pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

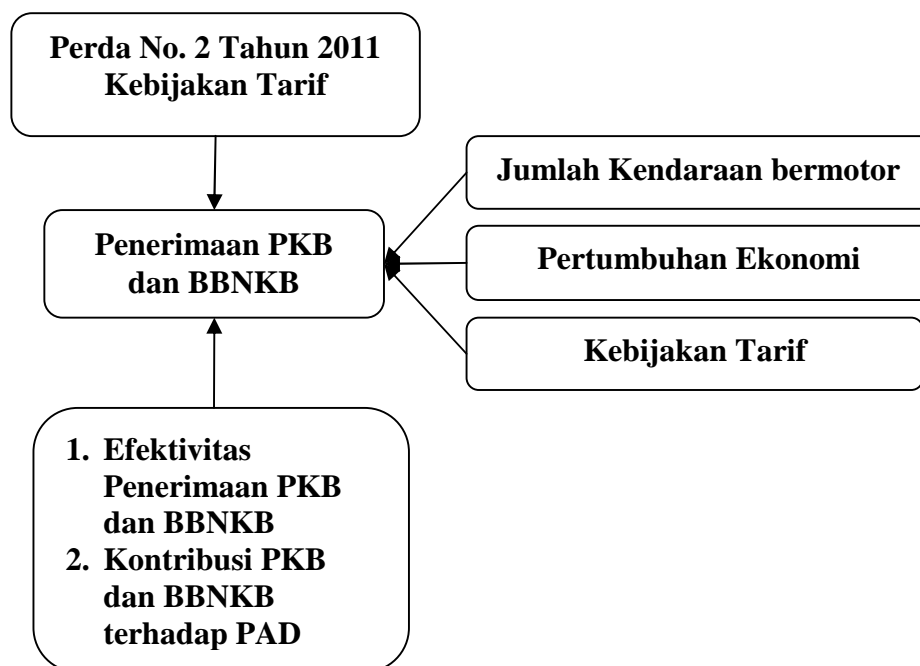
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah provinsi. Dengan diberikannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada daerah provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dewa N, 2013). Begitu juga dengan Provinsi Lampung, dengan adanya kewenangan yang telah diberikan tersebut, maka dalam rangka untuk mengoptimalkan PKB dan BBNKB tersebut pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2011 mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Dalam perda tersebut terdapat kebijakan baru pada PKB dan BBNKB. Pada PKB terdapat pajak progresif. Tarif progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungannya turut naik (Soemitro & Kania, 2004). Sedangkan pada BBNKB adanya kenaikan tarif . Sebelumnya sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tarif pajak BBNKB adalah hanya sebesar 10%. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, tarif BBNKB di Provinsi Lampung menjadi 15 % untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor sedangkan untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 atau mobil umum sebesar 12,5%.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung maka efektivitas penerimaan serta kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD setelah dilaksanakan kebijakan tarif diharapkan akan menjadi lebih baik. Dengan adanya tarif progresif dan kenaikan tarif maka akan meningkatkan jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak maka akan berpengaruh pula terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mira Mutia Rani (2013), jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di Bandar Lampung.

Selain itu pertumbuhan ekonomi sangat jelas kontribusinya terhadap penerimaan pajak, bahwa kondisi perekonomian yang kondusif akan memicu kinerja ekonomi

pelaku usaha serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat (Nadya, 2013). Sehingga apabila pertumbuhan ekonomi naik maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Fazriana Haniz (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **F. Hipotesis**

Menurut Sugiono (2004), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
3. Diduga kebijakan tarif berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
4. Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
5. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
6. Diduga kebijakan tarif berpengaruh positif terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
7. Diduga jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
8. Diduga jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan tarif secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut:

**I. Pendahuluan.**

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis serta sistematika penulisan.

**II. Tinjauan Pustaka**

Menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

**III. Metode Penelitian**

Memuat tentang jenis dan sumber data, metode analisis, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah di sediakan.

**V. Penutup**

Memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian